

**IMPLEMENTATION OF THE POSO SCUBA TOURISM OBJECT DEVELOPMENT
POLICY IN ATTRACTING TOURIST VISITS IN POSO REGENCY**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA POSO SCUBA
DALAM MENARIK KUNJUNGAN WISATAWAN
DI KABUPATEN POSO**

Mohammad Rusli Syuaib

Universitas Sintuwu Maroso

mohruslisyaib@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the policy for the development of the Poso Scuba tourism object in attracting tourist visits in Poso Regency. Primary data collection techniques were carried out through observation and interviews. Meanwhile, the technique for determining informants used the snowball technique by selecting seven informants who were considered capable of providing the information needed in this study. The results show that the implementation of the tourism object development policy in attracting tourist visits cannot yet be considered successful. Therefore, to achieve success, it is necessary to improve both human resources and the available resources at the Poso Scuba tourism object. This implies the need to establish cooperation networks in the tourism industry with tourism stakeholders, as well as the need for standard operating procedures (SOPs) to guide policy implementers in carrying out the established policies. In addition, there is a need for development planning for the arrangement of potential tourism object resources and/or a spatial master plan for the development of the Poso Scuba tourism object in Poso Regency.

Keywords: *policy implementation, tourism object, and Poso Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Poso Scuba dalam menarik kunjungan wisatawan di Kabupaten Poso. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan teknik penentuan informan menggunakan teknik *snowball*, yaitu dengan menetapkan 7 orang informan yang dirasa dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata dalam menarik kunjungan wisatawan dapat dikatakan belum berhasil. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu meningkatkan sumber daya manusia maupun sumber daya yang tersedia pada obyek wisata poso Scuba, artinya perlu dibangun jaringan kerjasama dalam kegiatan industri pariwisata dengan pelaku kegiatan kepariwisataan, serta perlu adanya SOP guna mengarahkan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Serta perlu adanya perencanaan penataan pengembangan sumber daya obyek wisata yang potensial dan atau rencana induk tata ruang pengembangan obyek wisata Poso Scuba yang ada di Kabupaten Poso.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Obyek Wisata, dan Kabupaten Poso*

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Pada beberapa wilayah, sektor ini bahkan terbukti mampu mengangkat daerah dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Peran strategis pariwisata tersebut tidak terlepas dari karakteristiknya sebagai sektor jasa yang melekat pada kehidupan masyarakat modern. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat, kebutuhan akan kegiatan pariwisata juga cenderung semakin meningkat.

Selain itu, pariwisata memiliki kekuatan sinergis karena keterkaitannya yang sangat erat dengan berbagai sektor lain. Perkembangan pariwisata berjalan seiring dengan kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan sektor pendukung lainnya. Daya saing pariwisata pada dasarnya bertumpu pada kemampuan mengelola dan mengolah sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.

Namun demikian, pesatnya perkembangan pariwisata dalam beberapa dekade terakhir juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada aspek ekonomi dan mengabaikan aspek non-ekonomi, seperti lingkungan hidup dan budaya masyarakat, telah menyebabkan berbagai permasalahan. Dampak tersebut antara lain berupa pencemaran lingkungan, degradasi budaya lokal, penggusuran, munculnya praktik prostitusi, serta terpinggirkannya masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata.

Komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, obyek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata pada hakikatnya merupakan upaya pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya lingkungan, baik yang bersifat fisik-biologis maupun budaya, yang harus dikelola secara bijaksana.

Di Indonesia, pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor ini ditunjukkan melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemerintah juga telah menetapkan dan mengelompokkan daerah tujuan wisata ke dalam wilayah-wilayah tertentu dengan tujuan pemerataan kunjungan wisatawan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam konteks ini, Poso Scuba merupakan salah satu obyek wisata yang berada di Kabupaten Poso dan termasuk dalam daerah tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata masih relatif terbatas. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Mapahena et al. (2021) mengenai pengembangan objek wisata Selat Lembeh di Kota Bitung, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat sekitar. Demikian pula penelitian Delly et al. (2019) tentang pengembangan kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu yang menggambarkan dinamika implementasi kebijakan pariwisata dalam mewujudkan program Wonderful Bengkulu 2020.

Landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayah darat dan laut secara mandiri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor pariwisata demi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya serta potensi alam yang dimiliki, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berwisata. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mendorong penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri, agar pembangunan kepariwisataan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Poso Scuba dalam menarik kunjungan wisatawan di Kabupaten Poso. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi dan dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. Teknik

pengumpulan data dengan kajian pustaka dilakukan melalui studi pustaka pada buku dan jurnal terbaru. Observasi dilakukan dengan kunjungan ke obyek wisata Poso Scuba di Kabupaten Poso. dan selanjutnya melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Poso Scuba dalam menarik kunjungan wisatawan di Kabupaten Poso Adapun pengumpulan data dengan kajian pustaka dilakukan melalui studi pustaka pada buku dan jurnal terbaru. Observasi dilakukan dengan kunjungan objek wisata Poso Untuk keabsahan data digunakan teknik triangulasi data. Menurut (Sugiyono, 2013) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diolah dengan teknik analisis data mulai dari reduksi data atau penyederhanaan data yang dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan. Kemudian penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di lapangan dengan tujuan agar lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

Pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah di Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan kebijakan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan kepariwisataan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata. Kerangka kebijakan tersebut menjadi dasar bagi implementasi pengembangan destinasi wisata, termasuk obyek wisata Poso Scuba di Kabupaten Poso. Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana kebijakan dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana serta pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, komunikasi internal antar aparaturnya serta komunikasi eksternal dengan pengelola destinasi wisata Poso Scuba dinilai telah berjalan dengan baik. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan infrastruktur wisata dibahas secara terbuka bersama kepala seksi, staf pelaksana, serta pihak pengelola destinasi.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan pemilik usaha destinasi wisata Poso Scuba yang menyatakan bahwa komunikasi dari Dinas Pariwisata, khususnya terkait promosi, telah dilakukan dengan cukup baik. Namun demikian, meskipun komunikasi telah terjalin, efektivitasnya belum sepenuhnya mampu mendorong Poso Scuba menjadi destinasi unggulan, terutama karena masih terbatasnya strategi promosi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik, merupakan determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengembangan destinasi pariwisata masih menjadi kendala utama. Jumlah aparaturnya yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata dinilai belum memadai, sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga tercermin dari minimnya fasilitas pendukung di objek wisata Poso Scuba, seperti belum tersedianya papan informasi yang memadai serta akses jalan menuju lokasi yang masih sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan wisatawan mengenai keberadaan dan potensi obyek wisata Poso Scuba.

3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan komitmen, dedikasi, dan kesediaan aparaturnya dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun jumlah sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas, para pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang positif dan dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan obyek wisata Poso Scuba. Hal ini menunjukkan adanya komitmen normatif yang kuat dari aparaturnya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Terkait dengan insentif, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan obyek wisata tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketiadaan sistem insentif yang jelas berpotensi mempengaruhi keberlanjutan motivasi pelaksana kebijakan dalam jangka panjang.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan, khususnya melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas (fragmentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Poso Scuba belum didukung oleh SOP yang spesifik. Pelaksanaan kegiatan masih mengacu pada peraturan dan tata kerja umum yang telah ada sebelumnya.

Meskipun pembagian tanggung jawab antar unit kerja telah berjalan dengan relatif baik, ketiadaan SOP menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya siap mendukung implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata secara efektif dan terstandar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan empiris di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Poso Scuba dalam menarik kunjungan wisatawan di Kabupaten Poso belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan utama dalam pengembangan destinasi wisata tersebut. Selain itu, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum terarah dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasi.

Meskipun demikian, sikap dan dedikasi para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang positif terhadap pengembangan obyek wisata Poso Scuba. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta penyusunan SOP yang komprehensif agar implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Poso Scuba dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin, 2002. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara Jakarta
- Arida, I Nyoman Sukma, 2009. Meretas Jalan Ekowisata Bali. Denpasar : Universitas Udayana.
- Berkat, AJ, and Medlik S, 1987. Tourism, Past Present and Future. Widya. Yogyakarta
- Dunn, William N, 1998. Analisa Kebijakan Publik. Hanindita Graha Widya. Yogyakarta
- Edward III, George C, 1980. Implementing and Regional Tourism Planning Methodologies and Case Studios. World Organization, Rutledge. London
- Fandeli, Chafid. 1995. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Yogyakarta
- Gamal Suwanto. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta : Andi
- Hamalik, Oemar 1978. Travel dan Tour Asas-Metode-Teknik. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. ALFABETA, Bandung.
- Musanef, 1996. Manajemen Usaha Pariwisata Indonesia. Jakarta : PT Toko Gunung Agung
- Mulyana, Dedi, M.A 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung
- Moleong, Lexy. J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, 2003. Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta
- Pearce, Douglas. 1983. *Toursit Development : Topics In Applied Geography*. England : Longmand Group Limited.
- Pendit S, Nyoman. 1987. *Ilmu Kepariwisata : Suatu Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Salah Wahab. 1996. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Singarimbun, Masri. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Spillane, James. J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sujali, 1989. *Geografi Pariwisata Dan Kepariwisata*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Univeresitas Gadjah Mada.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- TIM, 2010. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*. Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa
- Yoeti, Oka A. 1995. *Anatomi Pariwisata*. Bandung : Angkasa
- Yoeti, Oka A. 1995. *Penuntun Praktis Pramuwisata Profesional* : Angkasa
- Zubyani, H. 1995. *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Kepariwisata (sebuah studi kasus di Daerah Riau Kepulauan Propinsi Riau)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-undang tahun 2009 No. 10 tentang Kepariwisata adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan kepariwisataan
- Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang RI No. 24 tahun 1992 tentang Penataan ruang.
- Undang-undang RI No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan daerah dan pusat
- Undang-undang RI No. 10 tahun 2009 pasal 6 dan 7 tentang pembangunan pariwisata

